

MOTIVASI IRAN MEMBUKA KEMBALI KANTOR KEDUTAAN BESAR DI INGGRIS TAHUN 2015

Oleh :
Alfajri
Pembimbing: Faisyal Rani
Bibliografi: 23 buku, 11 jurnal, 21 website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-
63277

Abstract

This research focuses on the motivation of Iran to reopen the Office of the Embassy in the UK in 2015. The closure of the Iranian embassy and the British started from the attack protesters against the Office of the British Embassy in Iran. Britain has imposed a number of sanctions and embargo against Iran over its nuclear development. Iranian diplomacy in obtaining freedom nuclear development achieved during the reign of President Hassan Rouhani through the Joint Action of Geneva of Interim Agreement on Iran's Nuclear Program which was attended by Britain, France, China, USA, Russia and Germany (P5+1). The results of this agreement known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

This research used of journals, books, and websites. The theory used in this research is National Interest in Realism perspective. Level of analysis is National State.

This research explain that Iran's efforts to reopen the Office of the Embassy in the UK is to obtain the removal of sanctions of Iran and to restore the confidence of the international community related to Iran's nuclear program.

Keyword: Embassy, National Interest, Nuclear, NPT (Non-Proliferation Treaty)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyerangan di Kedubes Inggris di Teheran berawal dari aksi demonstrasi para mahasiswa yang menentang langkah Inggris menerapkan sanksi ekonomi lebih berat terhadap Iran terkait program nuklirnya. Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, menerapkan berbagai sanksi ekonomi, termasuk memutuskan seluruh transaksi

keuangan dengan Iran setelah *Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)* mengungkapkan berbagai bukti yang mengindikasikan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Demonstrasi menjadi tak terkendali saat para demonstran masuk ke halaman kedubes Inggris, menurunkan bendera Inggris, membakar satu kendaraan milik kedubes, dan melempari gedung kantor kedubes dengan bom molotov.

Insiden penyerangan itu langsung memicu kemarahan dunia internasional meski Pemerintah Iran telah menyatakan penyesalan atas perilaku yang tak bisa di terima itu. Kejadian tersebut langsung di tanggapi oleh 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan secara aklamasi mengutuk sekeras-kerasnya peristiwa tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga mengaku kaget dan marah dengan insiden itu. Dia juga mendesak otoritas Iran mencegah peristiwa itu terulang Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyebut penyerangan Kedubes Inggris itu sebagai "penghinaan" terhadap masyarakat internasional.

Bahkan China, salah satu sekutu terdekat Iran yang tidak menyetujui sanksi-sanksi Barat terhadap Negara itu, mengkritik terjadinya penyerangan. China selalu menekankan bahwa keselamatan dan kehormatan para personel dan property diplomatic harus dijamin dan dilindungi.

Aksi penyerangan ini mengakibatkan pada tanggal 30 september 2011, Pemerintah Inggris memutuskan menarik semua diplomatnya dari Iran dan mengusir seluruh diplomat Iran di Inggris serta memerintahkan Kedutaan Besar Iran di London ditutup.

Di tengah kemarahan masyarakat internasional, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani berkomentar, kemarahan rakyat Iran itu dipicu perilaku Inggris sendiri, yang selama puluhan tahun selalu berusaha mendominasi Iran. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya mengeluarkan sebuah resolusi sanksi terhadap Iran. Setelah itu, PBB berturut-turut menjatuhkan lima resolusi lainnya terhadap Teheran.

Resolusi terbaru Iran diambil oleh anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu 9 Juni 2010 di New York, AS. Presiden DK PBB Croude Heller

memutuskan sanksi terhadap Iran. Resolusi tersebut meliputi berbagai bidang yang mempunyai hubungan dengan program nuklir Iran.

Adapun sanksi itu menyangkut sektor ekonomi, perbankan, individu, pertahanan dan lembaga-lembaga. Bila dilihat secara umum maka bisa dikatagorikan dalam hal ekonomi, politik. Belum sampai disini saja, sanksi tersebut juga memperluas embargo senjata terhadap Iran.¹

Resolusi sepihak tersebut membentangkan jalan bagi AS dan sejumlah negara lainnya untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Akibatnya, negara ini menderita kerugian yang tidak kecil. Sanksi terhadap perusahaan kapal laut Republik Islam Iran, pemeriksaan terhadap barang melalui jalur udara dan laut dari dan menuju Iran, penerapan sanksi masif terhadap perbankan, asuransi dan institusi finansial Iran, tekanan terhadap industri migas Iran, pengawasan khusus terhadap Iran, termasuk individu dan institusi negara ini yang bergerak di bidang ekonomi, perdagangan dan finansial, mengindikasikan pihak lawan berupaya untuk membatasi ruang gerak Iran di arena internasional.

Oleh karena itu, meskipun Iran termasuk negara yang menandatangani perjanjian traktat NPT, tapi tidak mendapatkan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir yang bertujuan damai. Laju tekanan sanksi ini semakin ketat dan mencapai puncaknya pada tahun 2009 yang terus berlanjut hingga terpilihnya Hassan Rohani sebagai presiden Iran pada Juni 2013.

Hubungan Iran dan Inggris pada masa Imam Khomeini

¹ Kompas. *DK PBB Jatuhkan Sanksi ke Iran* di akses pada 2 maret 2016
<http://internasional.kompas.com/read/2010/06/10/04523331/DK.PBB.Jatuhkan.Sanksi.ke.Iran>

Imam Khomeini sebagai pemimpin Revolusi Islam Iran meletakkan pondasi politik luar negerinya yang sarat dengan ketentuan dan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Imam Khomeini mempertahankan kebijakan luar negeri harus didasarkan pada ideologi, yaitu kebijakan luar negeri berarti kebijakan negara-negara Muslim dalam menghadapi negara-negara yang berada di luar perbatasan negara Islam.

Pasca revolusi, Iran dengan sistem wilayatul faqihnya saat ini memiliki hubungan diplomatik penuh dengan 99 negara di seluruh dunia.² Republik Islam Iran mengutamakan hubungan dengan negara-negara dan organisasi Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), selain juga dengan organisasi gerakan non blok. Iran berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar dikarenakan isolasi ekonomi dan politik oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.³

Isolasi dalam berbagai sanksi ekonomi dan embargo terjadi dikarenakan pihak barat menuding Iran sedang mengembangkan program nuklirnya. Pada tahun 1980 hingga 1989 terjadi perang teluk antara Iran dengan Irak. Iran yang baru saja membenahi pemerintahan dan merevolusi sistem pemerintahannya harus menghadapi cobaan berat ketika Irak mencoba menginvasi Iran pada tahun 1980 an.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri di era Imam Khomeini lebih banyak dialihkan kepada situasi yang terjadi pada saat itu, yaitu memperjuangkan Iran dan mengusir Irak. Iran dengan Irak yang dalam sejarah memiliki hubungan yang sangat kelimantara diantara keduanya dikarenakan Iran

mendukung gerakan separatis di Irak disebabkan para penganut mazhab syiah mendapatkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan sedangkan Irak juga tidak menyukai Iran dikarenakan Suku kurdi yang mayoritas penganut mazhab sunni tidak mendapatkan hak-hak politiknya. Hubungan Iran dan Inggris pada belum membaik karena Imam Khomeini lebih memfokuskan pada stabilitas keamanan di negaranya karena di serang oleh Irak.

Hubungan Iran dan Inggris pada masa Banisadr

Sebelum terpilih menjadi Presiden Iran, Bani Shadr adalah menteri Luar Negeri Iran. Bapak Abbolhasan Banisadr adalah teman dekat Imam Khomeini.⁴ Banisadr merupakan salah satu aktivis mahasiswa anti Syah yang pada tahun 1960-an kerap di penjarakan oleh Syah Pahlevi.

Dikarenakan mendapat tekanan dari pemerintah, Ia kemudian pergi ke Prancis dan melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne. Banisadr bertemu dengan Imam Khomeini dan akhirnya ia bergabung dengan kelompok perlawanan Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini.⁵ Banisadr menjadi Presiden Iran ditengah tekanan dunia barat dengan isolasi dan embargonya terhadap Iran. Banisadr menjadi Presiden Iran hanya dalam kurun waktu setahun lebih yang kemudian diberhentikan dari kursi presiden pada tanggal 21 Juni 1981 yang diduga bergerak melawan para ulama yang berkuasa, khususnya Mohammad Behesti kepala sistem peradilan Iran.

Banisadr kemudian bersembunyi di Tehran selama beberapa hari sebelum pelengserannya dari kursi Presiden dan dilindungi oleh partai "Mojaheden khalghe

² Iran masa imam Khomeini, "Ministry of Foreign Affairs, Islamic Republic of Iran", pada tanggal 20 april 2016

³ Graham E, Fuller (2003), *The Future of Political Islam*, Palgrave MacMillan, h. 41

⁴ Jessup, John E. (1998). *An Encyclopedic Dictionary of Conflict and Conflict Resolution, 1945-1996*. Westport, CT: Greenwood Press. p.

⁵ Mozaffari, Mahdi (1993). "Changes in the Iranian political system after Khomeini's death". *Political Studies*

Iran". Banisadsr berusaha menggalang dukungan dengan berusaha mengatur aliansi partai-partai yang anti terhadap Imam Khomeini. Dalam pandangannya, proses penggulingannya adalah bagian dari sistem pelemahan demokratisasi di Iran.⁶

Hubungan Iran dengan Inggris pada masa ini tidak begitu dekat karena adanya konflik internal di dalam pemerintahan. Dan Presiden Iran ini lebih mengutamakan stabilitas dalam negeri. Dan kerjasama dengan Inggris belum tercapai. Upaya diplomasi dengan Negara Negara Eropa juga kurang di lakukan.

2.4 Hubungan Iran dan Inggris pada masa presiden Mohammad Ali Rajai

Muhammad Ali Rajai merupakan seorang presiden yang paling singkat menduduki presiden didunia dari tanggal 02 sampai dengan 30 Agustus 1981.

Sebelum menjadi presiden ia menjabat sebagai perdana menteri di era Banisader. Mohammad Ali Rajai dibunuh dalam serangan bom pada 30 Agustus 1981 bersama dengan perdana menteri Javad Bahonar di kantor perdana menteri di Tehran. Mohammad Ali Rajai merupakan salah seorang presiden Iran yang paling dicintai rakyatnya karena kebijakan-kebijakan politiknya yang populis dan memihak kepada rakyat kecil, karena dia memang lahir dari seorang rakyat jelata. Selain itu, dalam politik luar negerinya, Mohammad Ali Rajai selalu mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Inggris yang sering menindas negara-negara yang menurut Amerika dan Inggris sebagai Negara pemberontak. Ali Rajai bahkan pernah menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai setan besar sedangkan Uni Soviet adalah setan yang rendah.

Hubungan Iran dan Inggris pada masa presiden Mohammad Ali Rajai tidak

berjalan baik, karena presiden ini memang anti dengan Negara Inggris dan sekutunya. Inggris selalu berusaha untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran melalu embargo ekonomi terhadap Iran. Yang mengakibatkan menurunnya perekonomian di Negara Iran meskipun Iran termasuk Negara pengekspor minyak terbesar kedua di dunia.

2.5 Hubungan Iran dan Inggris pada masa presiden Ali Khomeini .

Pada bulan Oktober 1981 Ali Khomeini secara resmi dilantik menjadi presiden Iran. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Ali Khomeini berjanji akan menghilangkan segala bentuk penyimpangan, Liberalisme, dan pengaruh dari Amerika Serikat dan Inggris. Khomeini berperan penting dalam menjaga kedaulatan Iran setelah pada tahun 1980 Irak mulai melancarkan serangannya ke Iran. Sebagai presiden, ia mulai menguatkan sistem pertahanan Iran melalui penguatan pasukan militer dan pasukan basiji yang loyal terhadap revolusi Islam.⁷

Dalam hal kebijakan luar negerinya. Ali Khomeini termasuk salah satu tokoh yang mengecam atas pendudukan Amerika di Irak. Walaupun Iran dan Irak memiliki sejarah kelam, tetapi atas nama kemanusiaan, menurut Ali Khomeini tidak ada negara manapun yang dapat menindas terhadap negara lain, termasuk juga negara Irak. Pada masa periode Ali Khomeini menjabat presiden, kebijakan luar negeri Iran lebih berfokus kepada permasalahan Iran dengan Irak.

Untuk menjaga kedaulatan Iran, Ali Khomeini berusaha menjaga persatuan dan pertahanan dalam negeri bersama Imam Khomeini. Selain itu pula, antara kepentingan dunia Islam sebagai landasan politik Iran dan kepentingan Iran selalu

⁶ Mehdi Mozaffari (1993), *Changes in the Iranian Political System after Khomeini's Death*, Volume 41, Issue 4, pages 611–617

⁷ Revolusi Iran di akses pada 30 mei 2016
http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolution/revolution_and_iran_after1979_4.php

mengalami fluktuasi. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang “tidak senang” dengan revolusi Islam mulai melancarkan serangannya dengan membantu Irak dalam perang teluk.

Perang Irak-Iran adalah salah satu peristiwa penting yang berpengaruh terhadap hubungan antara negara Iran dan Eropa selain juga dengan Amerika Serikat. Irak menginvasi Iran pada bulan September 1980 dan merebut beberapa bagian wilayah Iran. Negara-negara Eropa menyatakan bahwa mereka khawatir tentang perang yang terjadi antara Iran dan Irak dan mereka bersikeras pada pemecahan masalah dengan jalan damai atas dasar resolusi PBB dan menekankan bahwa mereka siap untuk rekonstruksi Irak dan Iran jika mereka mengakhiri perang.⁸

Walaupun Uni Eropa pernah menyatakan ingin jalan damai dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Irak dengan Iran, tetapi dalam praktiknya negara-negara Eropa lebih banyak mendukung Irak selama delapan tahun perang karena dalam sistem bilateral mereka membutuhkan dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris untuk melawan Uni Soviet yang saat itu menyerang beberapa negara Eropa sehingga mereka mengikuti kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran.⁹ Alasan Amerika Serikat dan Inggris tidak menyukai Iran selain karena revolusi yang terjadi juga dikarenakan para pendukung dan loyalis Imam Khomeini pada awal masa-masa revolusi menyegel kedutaan Amerika Serikat.

Kemudian, presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter meminta dukungan dari negara-negara Eropa dalam krisis sandera yang dilakukan loyalis dan

pendukung Imam Khomeini serta memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Akibatnya, negara-negara Eropa mengutuk Iran dan meminta mereka untuk membebaskan sandera Amerika Serikat.¹⁰ Setelah itu, negara-negara Eropa menyatakan akan mendukung Amerika Serikat di PBB dalam melawan Iran.

Setelah Irak dan Iran melakukan gencatan senjata, menteri luar negeri Luxemburg, Belanda dan Italia datang ke Iran untuk bernegosiasi secara bilateral dan menyatakan kesiapan mereka untuk mempromosikan hubungan politik dan ekonomi dengan Iran.¹¹ Negosiasi ini menormalkan kembali hubungan Iran dengan negara-negara Eropa.

2.6 Hubungan Iran dan Inggris pada masa Presiden Hashemi Rafsanjani

Setelah delapan tahun memburuknya politik luar negeri Iran di bawah presiden Khomeini, Rafsanjani berusaha membangun kembali hubungan dengan negara-negara Arab serta dengan negara-negara di Asia Tengah termasuk dengan Azerbaijan, Turkmenistan dan Kazakhstan. Namun, hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tetap tidak mengalami perubahan, meskipun Rafsanjani dapat menangani persoalan krisis yang terjadi di Iran.

Pada tahun 1991, Rafsanjani berusaha memperbaiki hubungan Iran dengan Barat, meskipun ia tetap menolak menghapuskan fatwa mati Imam Khomeini terhadap penulis Inggris Salman Rusdi. Pasca perang Irak-Iran, kebijakan luar negeri Iran lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam negeri. Kekurangan pangan dan kelemahan pemenuhan ekonomi yang terjadi selama

⁸ Velayati, A. A. (1997). *Political History of Imposed War of Iraq against Islamic Republic of Iran*. Tehran: Daftare Nashre Farhange Eslami.

⁹ Naghibzadeh, A. (2003). *European Union since Outset*. Tehran: ghomes.

¹⁰ Valdani, A. J., & Ansari, A. R. (1995). *United Europe and its relations with Iran*. Tehran: Ministry of Economy and Finance

¹¹ Sanaie, A. (2001). *Detente in Relations of Iran and Europe*. Bardashte dovom

perang teluk, membuat Hashemi harus merekonstruksi kebijakan ekonomi dalam negerinya.

Dalam masa transisi sistem internasional Hashemi Rafsanjani berusaha menerapkan kebijakan pragmatis dengan menggabungkan prinsip-prinsip tradisional Republik Islam Iran dengan kebutuhan dalam negeri untuk perubahan ekonomi di satu sisi dan membuat keseimbangan antara realisme dan ideologi republik Islam Iran di sisi lain.¹²

Setelah peperangan yang memakan waktu dan keuangan yang cukup signifikan, Rafsanjani berusaha menempatkan penanganan persoalan domestik dan ekonomi menjadi prioritas utama. Persoalan persoalan domestik seperti: pengangguran, inflasi dan tidak stabilnya harga pokok dalam negeri menjadi pusat perhatian Rafsanjani.¹³ Untuk itu, untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, semuanya bergantung diplomasi Rafsanjani terhadap negara negara lain.

Rafsanjani berusaha memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan negara negara Eropa karena Eropa memiliki dua negara yang cukup berpengaruh di PBB. Akan tetapi, kasus Salman Rusdi, warga negara Inggris yang menerbitkan bukunya yang berjudul "Satanic Verse" telah menghina Nabi Muhammad Saw. Selain mendapat kecaman dan kutukan dari Iran, buku karangan Salman Rusdi ini mendapat protes dari seluruh umat Islam khususnya Imam Khomeini yang mengeluarkan fatwa bahwa Salman Rusdi harus dihukum mati, membuat hubungan Iran dengan negara-negara Eropa menjadi lambat dan menegang.

¹² Fakhreddin Soltani and Reza Ekhtiari Amiri, *Foreign Policy of Iran after Islamic Revolution*, *Journal of Politics and Law*, Vol. 3, No. 2; September 2010 h. 202

¹³ Amiri, A. (2006). *The foreign Policy of Islamic Republic of Iran*. Tehran: Oloome Novin.

Negara negara Eropa bereaksi keras terhadap sikap Iran dan fatwa mati Salman rusdi yang pada gilirannya membuat hubungan Iran dengan negara negara Eropa semakin tegang terutama dengan Inggris.

Pemimpin Negara negara Eropa menyatakan bahwa fatwa Imam Khomeini adalah reaksi radikal dan hanya berlaku bagi kalangan umat Muslim Syiah bukan untuk Sunni serta menentang asas kebebasan berekspresi.

Negara negara Eropa mengabaikan dan mengesampingkan fatwa Imam Khomeini dengan membatasi hubungan diplomatik dengan Iran dan mengeluarkan resolusi sebagai reaksi terhadap fatwa Imam Khomeini di Strasbourg, Prancis.¹⁴

2.7 Hubungan Iran dan Inggris pada masa presiden Mohammad Khatami

Khatami menjabat Presiden Iran selama dua periode dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005. Kemenangan Khatami dalam pemilihan presiden 1997 merupakan titik balik hubungan diplomatik Iran dengan negara negara Eropa. Mohammad Khatami memulai politik luar negerinya dengan bergerak dari arah konfrontasi ke arah konsiliasi.

Khatami lebih memilih konsiliasi ketimbang harus berbenturan dengan negara lain terutama dengan negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Akan tetapi, hubungan Iran dengan USA sama seperti tahun tahun sebelumnya karena saling mencurigai satu sama lain. Dalam pendekatan politik luar negerinya, Khatami lebih memilih pendekatan reformis dengan berdasarkan pada dua pilar.¹⁵

1. Pengenduran dalam pengambilan kebijakan luar negeri Iran untuk

¹⁴ Valdani, A. J., & Ansari, A. R. (1995). *United Europe and its relations with Iran*. Tehran: Ministry of Economy and Finance

¹⁵ Amiri, A. (2006). *The foreign Policy of Islamic Republic of Iran*. Tehran: Oloome Novin

memecahkan masalah Iran dengan negara-negara lain

2. Reformasi politik dalam urusan dalam negeri. Pengenduran dalam kebijakan luar negeri Iran dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan antara Iran dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara Eropa yang sebelumnya semakin memanas. Khatami berusaha untuk menghindari prioritas ideologis karena bisa membuat masalah dalam proses meningkatkan hubungan Iran dengan negara-negara lain.

Untuk itu, negara-negara Eropa yang terlebih dulu berkonsultasi dengan Iran “membujuk” Amerika Serikat untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran. Sikap Eropa yang berubah terhadap Iran membuat Iran semakin kuat di kawasan ini. Ini ditandai dengan pengaruh Iran terhadap negara-negara kawasan seperti Lebanon, Siria dan Afghanistan.

Hubungan Iran dengan Inggris dan sejumlah Negara di Eropa mulai membaik dengan adanya dukungan dari Negara-Negara Eropa termasuk Inggris dengan mendesak Amerika Serikat untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran.

2.8 Hubungan Iran dan Inggris pada masa Presiden Ahmadinejad.

Pada tahun 2005, respon Inggris dan negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran semakin gencar diantaranya melalui pemberitaan-pemberitaan di media, dimana spekulasi tentang kelanjutan program nuklir tersebut ramai menjadi topik pembahasan terutama setelah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi setelah pergantian Presiden.

Agenda dan tantangan yang cukup signifikan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Iran pada masa Presiden

Ahmadinejad, dapat dikatakan adalah isu nuklir Iran yang juga memiliki kaitan pada hubungan Iran dengan Inggris.

Agenda ini juga sangat menentukan kepentingan nasional Iran dan kemampuannya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yang juga strategis. Namun demikian, pilihan yang tersedia bagi Pemerintahan Ahmadinejad untuk menghadapi manuver yang dilakukan Inggris sangatlah terbatas.

Baik melunakan sikap dengan melepas sebagian kepentingan nasional yang merupakan hak rakyat Iran, atau dengan mempertahankan hak tersebut meskipun memiliki kemungkinan besar

Ahmadinejad mengatakan status program nuklir Iran sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan merupakan hak sah Iran, dan Iran tidak akan merubah pendiriannya mengenai program nuklirnya meskipun Inggris dan negara-negara tertentu telah berupaya untuk menekan IAEA, menjatuhkan sanksi-sanksi, bahkan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan program nuklir Iran tersebut.¹⁶

Inggris dan sejumlah Negara Eropa mengatakan bahwa Iran mengembangkan senjata pemusnah massal. Dan Inggris mendesak Iran untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya salah satunya dengan cara melakukan embargo kepada Iran. Inggris mendesak DK PBB untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran. Usaha Inggris untuk mendesak Iran menghentikan program nuklirnya tidaklah mudah karena Iran juga didukung

¹⁶ “Leader Says Iran not after A-Bomb, Blasts US ‘Deception’,” Islamic Republic News Agency, diakses pada 26 April 2016 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/118799-T%2025107%20-%20Kebijakan%20nuklir-Analisis.pdf>

oleh Cina dan Rusia yang merupakan anggota tetap DK PBB.

Berbagai perundingan terkait program nuklir Iran telah dilakukan Inggris dan PBB namun tidak mencapai kesepakatan. Kontroversi mengenai program nuklir Iran kembali mencuat sejak Agustus 2002 ketika *National Council of Resistance in Iran* (NCRI) mengungkapkan informasi bahwa Iran telah membangun fasilitas yang berhubungan dengan nuklir di Natanz dan Arak.

Dan program nuklir Iran terus berlanjut sampai sekarang walaupun mendapat kecaman dari banyak pihak terutama dari Inggris. Pada 28 Agustus 2007, dalam pernyataannya, Ahmadinejad menegaskan bahwa Iran tidak akan memperlambat aktivitas nuklirnya.¹⁷

Pada November 2007, Ahmadinejad memberikan pernyataan bahwa Iran telah mencapai target kunci nuklir dengan mengoperasikan 3,000 alat pengayaan uranium. Walaupun tampak sangat meyakinkan, pernyataan ini bertentangan dengan laporan IAEA bahwa yang beroperasi hanya 2,000 dan sebanyak 650 lainnya dalam masa percobaan.¹⁸

Hubungan Iran dengan negara-negara Barat sudah diwarnai ketegangan sebelumnya melalui isu program nuklir yang dijalankan oleh Iran yang mendapat reaksi keras dari negara-negara Barat. Iran menangkap 15 pelaut Inggris yang melewati batas wilayahnya. penangkapan Iran atas 15 pelaut Inggris terjadi karena adanya kepentingan nasional. Iran mempunyai kepentingan nasional terhadap kasus ini,

¹⁷ Iran pada masa ahmadinejad di akses pada 26 mei 2016
<https://middleeastindonesia.wordpress.com/2011/07/10/analisis-kebijakan-proliferasi-nuklir-iran-masa-kepemimpinan-ahmadinejad/>

¹⁸ Nuklir Iran di akses pada 26 mei 2016
<https://middleeastindonesia.wordpress.com/2011/07/10/analisis-kebijakan-proliferasi-nuklir-iran-masa-kepemimpinan-ahmadinejad/>

yaitu mempertahankan integritas wilayahnya. Perairan Shatt Al-Arab merupakan wilayah Iran yang berbatasan dengan Irak. Iran mengklaim bahwa kapal Inggris beserta ke 15 awak kapal tersebut telah memasuki 0,5 km ke dalam wilayahnya.

Penangkapan tentara Inggris oleh Iran ini terjadi sehari menjelang pemungutan suara di DK PBB mengenai program nuklir Iran yang dikenal dengan resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007, penangkapan tersebut membuat situasi semakin panas karena Inggris merupakan salah satu pendorong keluarnya Resolusi 1747 DK PBB disamping Amerika Serikat (AS) sebagai aktor utama yang menjatuhkan sanksi ekonomi, politik dan militer terhadap Iran.

Pada dasarnya penahanan terhadap pelaut Inggris di wilayah perairan ini bukanlah yang pertama kali oleh Iran. Pada tahun 2004, 8 pelaut Inggris ditahan oleh Iran karena sebab sama di perairan ini. Peristiwa itu diselesaikan setelah 8 pelaut Inggris minta maaf secara terbuka di stasiun televisi Iran. Akan tetapi, peristiwa kali ini terjadi di latar belakang yang sama sekali berbeda, dimana pada peristiwa kali ini Iran sedang bersitegang dengan negara-negara Barat karena masalah nuklir, dan resolusi baru Dewan Keamanan mengenai sanksi terhadap Iran.

Dua isu dalam waktu yang berdekatan ini menimbulkan spekulasi akan terjadinya perang antara Iran dengan negara-negara barat khususnya Inggris dan AS. Setelah terjadinya peristiwa penahanan ini, Inggris dan AS tidak saja mengancam Iran, tapi juga menggunakan kesempatan latihan militer mengirim kapal induk John C. Stennis dan Dwight D. Eisenhower ke Teluk Persia.

Dalam situasi demikian, peristiwa penahanan pelaut Inggris sangat dikhawatirkan akan semakin meningkat,

bahkan memicu aksi militer bersama Inggris dan AS terhadap Iran, meskipun dalam pernyataan yang lain pemerintah Inggris mengedepankan penyelesaian dengan langkah diplomatis. Sedangkan dipihak lain, Iran menyatakan bahwa penahanan atas ke-15 tentara Inggris ini merupakan masalah hukum bukan politis, meskipun banyak pihak menyatakan bahwa Iran menahan pelaut Inggris ini untuk dijadikan tameng politis dalam kasus yang lain (krisis nuklir).

Iran menganggap bahwa ke-15 tentara Inggris tersebut telah memasuki wilayah teritorial Iran tanpa izin. Pemerintah Iran juga memandang bahwa penyelesaian masalah ini, hendaknya dapat diselesaikan dengan jalur diplomatis Pemerintah Iran akan membebaskan ke-15 tentara Inggris yang ditahan dengan syarat adanya permintaan maaf resmi dari pemerintah Inggris atas insiden ini dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Perdana Menteri Inggris Tony Blair memperingatkan Iran, jika tidak selesainya membebaskan pelaut Inggris, peristiwa akan memasuki tahap lain, namun sementara itu juru bicaranya menjelaskan bahwa apa yang disebut tahap lain tidak berarti Inggris akan mengambil aksi diplomatik ekstrim seperti mengusir diplomat Iran, atau mengambil aksi militer.

Ini berarti Inggris tidak berniat mengambil aksi militer. Kedutaan Besar Iran untuk Inggris dalam pernyataannya menyatakan yakin bahwa pemerintah kedua negara mampu menyelesaikan masalah ini melalui kontak dan kerja sama erat, dan menghindari terulang kembali masalah serupa.

Dengan adanya indikasi-indikasi yang mengarah pada melunaknya sikap Inggris, Pemerintah Iran melalui Presidennya, Mahmoud Ahmadinejad menyatakan pembebasan bagi ke-15 tentara Inggris pada tanggal 4 April 2007. Dalam pernyataan tersebut, pembebasan ini

merupakan hadiah bagi rakyat Inggris yang merayakan hari Paskah.¹⁹

Terlepas dari pernyataan Presiden Mahmoud Ahmadinejad tersebut, kebijakan Iran dalam menahan ke-15 pelaut Inggris adalah sebuah langkah yang berani dan penuh resiko karena sebelumnya Iran tengah mendapat sorotan dunia atas program nuklirnya. Krisis ini bisa saja memicu perang antara Iran dengan negara Barat khususnya Inggris dan AS. Namun Iran tetap melakukan kebijakannya dengan menahan ke-15 pelaut Inggris meskipun pada akhirnya melepaskannya

Pada bulan Januari 2006, Iran membuka segel internasional yang dipasang pada sekurang-kurangnya tiga fasilitas nuklir untuk meneruskan proses pengadaan bahan bakar nuklir melalui pengawasan IAEA.

Segel dibuka dari fasilitas pengayaan di Natanz, fasilitas penyimpanan Isfahan, dan Pars Tash. Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran melalui Juru Bicara kemudian mengumumkan bahwa Iran akan memulai kembali proses negosiasi dengan Rusia mengenai kelanjutan program nuklirnya.²⁰

Langkah pemerintah Iran ini dapat dikatakan sebagai reaksi dari pemerintah Iran atas tekanan yang berusaha dilakukan oleh Inggris untuk menghentikan program nuklirnya. namun demikian, langkah tersebut justru semakin memperkuat opsi untuk mengajukan permasalahan nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB.

Opsi ini disetujui oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Jerman dan Perancis secara kolektif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Jack Straw, bahwa langkah selanjutnya yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah nuklir

¹⁹ BBC, diakses dari situs www.temppointeraktif.com pada tanggal 30 mei 2016

²⁰ Steven R. Weisman dan Nazila Fathi, "Iranians Reopen Nuclear Centers," New York Times

Iran adalah dengan mengajukan masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian perlu diadakan rapat darurat Dewan Gubernur IAEA untuk mendukung langkah ini.²¹

Pada tahun 1968 tepatnya 1 Juli, ketika pertama kali dibuka untuk persetujuan internasional, Iran menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Penandatanganan perjanjian ini memungkinkan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.²²

Sebagai negara yang turut menandatangani NPT, Iran berkewajiban melaporkan semua program pengembangan nuklirnya kepada IAEA. Semua instalasi nuklir Iran diawasi secara ketat dan intensif oleh IAEA. Sedemikian kooperatifnya Iran dengan IAEA sehingga mengizinkan lembaga ini untuk mengerahkan lebih dari dua ribu personil dalam inspeksinya.

Dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2004, program pengembangan nuklir Iran hampir selalu menjadi pemberitaan di berbagai media massa di dunia. Hal ini terjadi karena kecurigaan dunia Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, terhadap teknologi nuklir yang sedang dikembangkan Iran. Amerika Serikat bersama Jerman, Inggris, dan juga Prancis, menilai Iran secara diam-diam membangun kekuatan nuklirnya untuk tujuan militer dengan melakukan proses pengayaan uranium tingkat tinggi.²³

²¹ John Daniszewski, "Iran Nuclear Issue Moves toward U.N.," Los Angeles Times

²² Anne Hessing Cahn, "Determinants of the Nuclear Option: The Case of Iran," Nuclear Proliferation in the Near Nuclear Countries (Cambridge: Ballinger Publishing Co., 1975), Hlm. 186

²³ "Adherence and Compliance with Arms Control: the Nonproliferation and Disarmament Agreements", United States Department of State, Diakses pada tanggal 27 april 2016
http://intelligence.house.gov/Media/PDFS/Adherence_andCompliance080405.pdf_hlm.77

Namun demikian Iran menyangkal tuduhan tersebut tak berdasar dan menyatakan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai, sebagai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan energinya yang semakin meningkat.

Kebijakan luar negeri Hassan Rouhani terhadap Inggris

Pada pertengahan tahun 2013 setelah terpilihnya Presiden Hassan Rouhani, terdapat perubahan yang signifikan dari gaya dan karakteristik diplomasi Iran. Rouhani mulai menerapkan soft diplomasi terhadap dunia internasional ketika pertama kali memberikan pidato diplomatiknya pada Sidang Umum PBB ke 68 pada 24 September 2013. Diplomasi yang diterapkan Hassan Rouhani sangat terlihat ketika respon anggota sidang umum PBB terfokus kepada isi pidato yang disampaikan oleh Rouhani dan tidak ada yang melakukan *walk out* kecuali Israel.

Rouhani dengan soft diplomasi nya mampu menyampaikan poin-poin dan posisi Iran dengan cara yang sangat diplomatis, dengan isi yang tetap konsisten akan tujuan yang ingin dicapai yaitu menunjukkan posisi kontra terhadap zionisme, khususnya Israel dalam mengatur agenda Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara barat lainnya untuk menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi sebagai bentuk hukuman atas Iran yang mengembangkan teknologi nuklir.

Posisi Negara Iran mengacu kepada prinsip diplomasi yang dianut oleh Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, khususnya dalam bidang keamanan menganut prinsip *variable-sum game* dimana dalam perang maupun konflik bersenjata tidak ada negara yang akan mendapatkan posisi menang sepenuhnya dari negara lain.²⁴ Kedua negara

²⁴ Dina Y. Sulaeman, 2014, *Politik Luar Negeri Iran: Perspektif Global*, diakses pada tanggal 10 maret 2016

mengalami kerugian, yang menjadi perbedaan adalah seberapa besar kerugian negara tersebut dibanding negara lain.

Secara garis besar, terdapat perkembangan positif dalam politik luar negeri Iran setelah Rouhani terpilih jadi Presiden. Perkembangan positif tersebut ditandai dengan fokusnya Hassan Rouhani terhadap hak sipil yang sebelumnya banyak pelanggaran yang mengakibatkan banyaknya warga sipil yang luka dan meninggal saat menentang kebijakan presiden Ahmadinejad pada tahun 2008 hingga 2010.

Selain itu, dalam politik luar negerinya Rouhani berjanji akan meredakan ketegangan Barat dan Iran menyangkut program nuklirnya. Janji untuk meredakan ketegangan tersebut ditepati oleh Rouhani dengan menghadiri pertemuan dengan negara-negara P5 +1 yang terdiri atas AS, China, Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia pada tanggal 26 September 2013.

Kesepakatan nuklir yang di buat dengan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Cina, Rusia, dan Jerman atau lebih dikenal dengan *Rencana Aksi Bersama Menyeluruh* (JCPOA) membuat Inggris memberi peluang bagi Iran untuk membuka kembali kerjasama antara dua Negara. Pemerintah Inggris dan Dewan Keamanan PBB akan komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab dalam kesepakatan nuklir dengan Iran.

Hasil dari perundingan bersama ini atau dikenal JCPOA mengakibatkan sejumlah sanksi yang diberlakukan PBB terhadap Iran dicabut. Namun pencabutan sanksi ini berlaku selama Iran mematuhi kerjasama yang telah ditetapkan berdasarkan hasil JCPOA. Iran telah berjanji untuk mengizinkan pemantau internasional untuk memeriksa fasilitas nuklirnya selama 10 tahun ke depan dan langkah-langkah lain

yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan energi nuklirnya adalah murni untuk tujuan damai.

Resolusi Dewan Keamanan, yang mengikat secara hukum, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencabutan sanksi PBB. Resolusi ini tidak memiliki konsekuensi hukum atas sanksi yang ditetapkan secara terpisah oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Resolusi berlaku dalam 90 hari, sesuai dengan kerangka waktu yang dinegosiasikan di Wina untuk memungkinkan Kongres AS untuk melakukan kajian atas kesepakatan nuklir itu. Presiden Obama, yang telah mempertaruhkan banyak ambisi kebijakan luar negerinya atas kesepakatan itu, bersumpah akan memveto penolakan kongres atas kesepakatan nuklir tersebut. Resolusi itu tidak akan mencabut semua sanksi DK PBB terhadap Iran.

Embargo senjata tetap dipertahankan, dan akan dibentuk panel untuk meninjau impor teknologi sensitif berdasarkan kasus per kasus. Ada mekanisme untuk memperbaharui sanksi jika Iran tidak mematuhi komitmennya atas kesepakatan itu. Jika terjadi sengketa yang belum terselesaikan soal nuklir Iran, sanksi PBB secara otomatis kembali berlaku setelah 30 hari. Untuk menghindari perpanjangan sanksi, itu butuh pemungutan suara dari DK PBB.

Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Samantha Power, mengatakan kepada Dewan bahwa pencabutan sanksi akan mulai hanya ketika Iran memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan. Perjanjian ini mencakup pemenuhan syarat yang diberikan Negara P5+1 kepada Iran untuk mendapatkan hak pengembangan nuklirnya meliputi, program nuklir Iran harus diawasi ketat komunitas internasional, Iran harus menghentikan perngayaan uranium, dikurangnya stok bahan nuklir Iran dan

http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=14870&type=4#.U10qPKKw7IW

ditutupnya fasilitas nuklir Iran di wilayah Arak.²⁵

Sebagai timbal baliknya untuk Iran, sanksi ekonomi yang pernah diterapkan akan diganti rugi sebanyak US\$ 7 Miliar dan jaminan tidak akan dijatuhkannya sanksi ekonomi kembali kepada Iran.²⁶ Pertemuan yang dilakukan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York itu difokuskan untuk menyelesaikan masalah program nuklir Iran. Pertemuan yang dihadiri Presiden Iran Hassan Rouhani, itu berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk segera menuntaskan masalah tersebut dalam tempo yang singkat.

Rouhani sendiri menargetkan selesai dalam tempo satu tahun. Untuk menunjukkan keseriusan diplomasi Iran, Hassan Rouhani membawa proposal tentang nuklir Iran di pertemuan berikutnya pada 15-16 Oktober 2013 di Jenewa.

Rouhani berhasil memperjuangkan hak-hak pengembangan teknologi nuklir Iran dan menurunkan sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara P5+1 melalui *Joint of Action of Geneva Interim Agreement on Iran Nuclear Program* pada tanggal 24 November 2013 setelah melakukan negosiasi di tanggal 7 dan 8 November 2013 di Jenewa, Swiss.

Faktor strategis Inggris terhadap Iran

Iran sebagai salah satu Negara pengekspor minyak terbesar ke Eropa merupakan Negara yang sangat penting bagi perekonomian Eropa, termasuk Inggris.

Banyak nya pertentangan terhadap pengembangan senjata nuklir Iran di Negara Eropa membuat Iran kesulitan dalam berbagai hal termasuk ekonomi. Embargo yang di berlakukan Uni Eropa dan DK PBB membuat perekonomian Iran terhambat.

Turun nya perekonomian Iran membuat Iran mengalami penderitaan yang cukup panjang. Turun nya permintaan ekspor minyak karena embargo Inggris membuat Iran berupaya untuk mengembalikan hubungan dengan Inggris.

Keuntungan yang didapat Iran dengan diakui secara legal pengembangan nuklir nya akan membawa dampak yang sangat besar bagi Iran , hal ini karenakan:

1. Nuklir merupakan teknologi menjanjikan yang dapat membawa Iran menjadi bangsa yang maju. Konkretnya jika Iran berhasil memanfaatkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listriknya, maka Iran akan dapat membangun pembangkit tenaga yang jauh lebih murah dan sangat efektif. Dengan begitu anggaran subsidi untuk konsumsi listrik nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat dikurangi secara drastis. Itu artinya, untuk jangka panjang Iran akan sangat dimungkinkan menjadi negara yang mandiri hampir di semua bidang.
2. Dengan memiliki alternatif teknologi nuklir, dan cadangan minyak yang besar, Iran jelas akan lahir menjadi negara kaya. Sedangkan untuk jangka pendeknya Iran akan memperoleh devisa negara yang sangat besar, seiring meningkatnya harga gas dan minyak dunia. Teknologi nuklir dapat membantu Iran dalam melawan segala bentuk penindasan dan dominasi negara-negara barat atas Iran

²⁵ Wahyu Dwi Anggoro, 2013, *Israel Takut Nuklir Iran Disetujui* di akses pada tanggal 10 maret 2016
<http://international.okezone.com/read/2013/11/18/412/898708/israel-takut-nuklirandisetujui>

²⁶ Simon Sturde dan Nicolas Revisé, 2013, *Iran nuke deal launches six-month diplomatic battle*" Agence France-Presse. diakses pada tanggal 11 maret 2016
<http://news.yahoo.com/iran-world-powers-agree-nuclear-deal-021500101.html>

khususnya, serta negara-negara berkembang umumnya.

Ini jelas merupakan perisai tangguh yang dapat menahan hegemoni barat atas Iran. Lebih dari itu program pengembangan nuklir dinilai dapat meningkatkan semangat kemajuan seluruh rakyat Iran, yang selama ini hidup dalam berbagai tekanan, embargo, dan kekangan dunia barat sejak bergulirnya Revolusi 1979. Ahmadinejad menekankan bahwa, energi nuklir memiliki banyak manfaat hampir pada semua bidang kehidupan, termasuk bidang pertanian dan kedokteran. Pada saat energi fosil telah habis terkuras maka Iran akan mulai menjual energi nuklir pada bangsa lain dengan harga yang sangat tidak terjangkau, dengan begitu Iran dapat mendominasi dunia.

3. Keuntungan lain yang di dapat dari kesepakatan dengan kelompok P1+5 terkait pengembangan nuklir, Iran juga akan mengembangkan kekuatan politik Iran dikancah internasional yang dimulai dari kawasan timur tengah dimana dengan adanya kesepakatan ini memberikan indikasi adanya perubahan geopolitik di timur tengah dan membuktikan keunggulan strategi diplomasi pemerintahan Iran yang baru.
4. Letak geografis yang strategis, sumber daya minyak yang melimpah, dukungan dari rakyat Iran kepada pemerintah yang ditunjang oleh Teknologi tinggi, sumberdaya, kekuatan militer yang kuat, kualitas diplomasi dan pemerintahan yang kuat membuat Iran tumbuh menjadi negara yang patut diperhitungkan. Kebutuhan akan minyak bumi dan gas dunia yang sangat tinggi

dimana Iran adalah negara dengan pengekspor minyak terbesar ke dua di OPEC membuat Iran memiliki daya tawar politik yang semakin kuat. Selain itu Iran juga akan semakin mudah melakukan perdagangan dengan negara lain (terutama di kawasan Eropa dan Asia) yang sebelumnya selalu gagal dikarenakan adanya pengaruh dari AS.

Teori

Penggunaan teori disesuaikan dengan perspektif dan tingkat analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepentingan Nasional. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II.

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling umum dan paling mendasar yang digunakan dalam pembahasan politik luar negeri suatu negara. Konsep ini sering dipakai juga untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Dalam tahap operasional, kepentingan nasional yang tercermin dalam politik luar negeri itu ditetapkan dalam berbagai macam teknik yang berbeda.

Bentuknya dapat berupa kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam politik internasional atau dengan kata lain, suatu negara akan mempergunakan segalanya untuk mempengaruhi dunia luar demi menjamin kepentingan nasionalnya.

Para pengambil keputusan akan mempertimbangkan untung rugi dalam menentukan kebijaksanaan. Disamping itu, para pembuat keputusan sebagai aktor yang

rasional juga mempertimbangkan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan itu bahwa pengambil keputusan, disadari atau tidak, memiliki pendapat tentang prioritas nilai dan konsepsi tentang sarana-sarana yang dipunyai dan tujuan tersebut.

Dalam memahami kebijaksanaan politik luar negeri suatu negara tidak bisa dipisahkan dari kepentingan negara yang bersangkutan. Untuk dapat memahami permasalahan ini, konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku luar negeri (Iran) terhadap suatu negara (Inggris). Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, suatu negara akan menggunakan kebijaksanaan politik luar negeri, sekalipun berbeda dalam strategi dan tindakannya, tetapi semua sama dalam tujuan, yakni guna mencapai tujuan khusus kepada kepentingan nasional.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain melalui jalan konfrontasi maupun kerjasama.²⁷

Pengendalian yang dimaksud tidak hanya sebatas kemampuan untuk mengendalikan negara lain agar selalu bersikap lunak dan sejalan dengan kehendaknya, akan tetapi pengendalian yang dimaksud mempunyai artian yang lebih luas, yaitu kondisi dimana suatu negara memiliki kemampuan minimum dalam menjaga kelangsungan hidup (survival) di dalam politik internasional. Kemampuan minimum suatu negara menurut Morgenthau meliputi tiga hal, yaitu;

1. Perlindungan terhadap identitas fisik, yaitu harus mampu mempertahankan integritas teritorialnya.

2. Perlindungan terhadap identitas politik yang berarti harus mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya.
3. Perlindungan terhadap kulturnya yang berarti harus mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan suatu negara tidak akan pernah lepas dari keharusan untuk mengamankan wilayah, memajukan kesejahteraan ekonomi dan mempertahankan kultur negara-bangsa.

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.

Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah perspektif realis. Fokus analisisnya adalah keamanan negara dan kedaulatan wilayah sehingga ada penekanan pada kekuatan di bidang militer (military force) . Para penganut realis memandang bahwa setiap negara selalu mencari power dan perang adalah perencanaan karena sifat dasar dunia

²⁷ Hans J. Morgenthau dalam TA Coulumbis dan JH Wolfe, Introduction to Internasional Relations (Prentice Hall hal.163,1986), hal 163

²⁸ Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa, Terjemahan Kenneth W. Thompson, Third Edition. Affred A. Knoff, New York, 1963, hal. 141

internasional adalah anarki, kompetitif, dan konflik.

Realisme memiliki beberapa asumsi dasar mengenai manusia, yaitu

1. Pandangan yang bersifat pesimistik terhadap sifat dasar manusia,
2. Keyakinan bahwa studi hubungan internasional adalah merupakan studi yang penuh akan konflik, konflik yang terjadi karena hubungan internasional ini pada akhirnya hanya bisa diselesaikan dengan jalan perang,
3. Mengutamakan serta menjunjung tinggi nilai-nilai mengenai sistem keamanan serta ketertiban nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara,
4. pemikiran skeptis mengenai bahwa terdapat kemajuan dan perkembangan dalam sistem politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.²⁹

Perspektif realis melihat hal-hal yang terjadi seperti konflik, terjadinya perang, penguasa negara yang bersifat totaliter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan suatu hal yang wajar dan dapat ditemui dimana-mana.

Perspektif realis memandang bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Oleh sebab itu, tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara bangsa (nation-state). Pada tingkat analisis ini, negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.³⁰

Realis tidak menafikan prinsip-prinsip moral, hanya saja dalam prakteknya moralitas individual dikalahkan oleh kelangsungan hidup negara dan

penduduknya serta pencapaian kepentingan nasional.³¹ Realisme memfokuskan analisisnya pada pengejaran terhadap power dalam interaksi internasional dan tidak adanya keharmonisan kepentingan diantara negara-negara sehingga konsep self help menjadi penting dan kemampuan yang paling relevan adalah kemampuan dibidang militer.

Realisme juga melihat dunia ini sebagai tempat yang anarki dimana masing-masing negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kebebasan untuk mendapatkan kepentingannya sekalipun dengan cara-cara yang mengancam eksistensi dan keamanan aktor lain.

Realisme merupakan tradisi HI yang dari asumsi umumnya dianggap berpusat pada empat ide utama:³²

1. Sistem Internasional Bersifat Anarki
Di sini dimaksudkan bahwa Negara merupakan aktor independen yang harus membina hubungan dengan Negara lain, tidak ada entitas lebih tinggi yang boleh mengatur interaksinya. Di samping itu, sistem internasional ada dan tetap bersifat antagonis.
2. Negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional.
3. Semua Negara dalam sistem yang ada merupakan aktor tunggal bersifat rasional. Negara cenderung mengejar kepentingan pribadi dan mengambil sumber daya sebanyak mungkin.
4. Masalah utama bagi setiap Negara adalah kelangsungan dan bertahan

29 Louis Embun Prastika. *Realism* di akses 20 november 2015

http://louis-embun-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail

³⁰ Burchill, Scott. 2001. Realism and Neo-Realism, dalam; "Theories of International Relations". Palgrave. Hal 70-102.

³¹ Jack Donnelly, "The Ethics of Realism", in Christian Reus-Smit, Duncan Snidal (eds.), *The Oxford Handbook of International Relations*, Oxford University Press, 2008, hal. 150

³² Goodin, Robert E. (2010). *The Oxford Handbook of International Relations*. Oxford: Oxford University Press. hal. 132

hidup, oleh karena itu Negara berusaha membangun kekuatan dengan kekuatan militer untuk bertahan hidup yang akhirnya menciptakan dilema keamanan bagi negara lain.

Realisme juga menekankan kepada dua hal penting yang harus dikejar oleh suatu negara agar dapat 'survive' di lingkungan internasional yang anarki yaitu *power* dan *state security*.³³

Power yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau kapasitas negara, merupakan hal terpenting yang harus dimiliki untuk dapat menjamin eksistensi negara, karena dengan power inilah suatu negara dapat menciptakan keamanan. Negaranya serta dapat *survive* (*state survival is paramount*).

Keseimpulan

Hubungan bilateral antara Iran dan Inggris memang mengalami pasang surut setiap pergantian Presiden Iran. Pada awal awal pasca revolusi pemimpin Iran sebelum Hassan Rouhani memang sangat anti terhadap Negara Negara Eropa termasuk Inggris.

Negara Negara Eropa selalu berupaya untuk menghentikan Iran dalam pengembangan senjata nuklir nya, yang dianggap sebagai senjata pemusnah massal. Meskipun Iran mengatakan bahwa pengembangan senjata nuklir hanya untuk tujuan damai.

Setelah kesepakatan dengan Negara P5+1, Iran akhirnya bisa melanjutkan pengembangan senjata nuklir nya, dan pertumbuhan ekonomi Iran pada tahun 2014 meningkat menjadi 3,0 persen dari sebelumnya 1,7 persen pada 2013. Hal ini terjadi akibat pelanggaran sanksi yang dikenakan pada ekspor minyak Iran, pada

rantai pasokan di sektor-sektor kunci ekonomi, serta peningkatan kepercayaan konsumen dan bisnis.

Tujuan di bukanya kembali Kantor Kedutaan Besar Iran di London tidak lain untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap Iran yang selama puluhan tahun telah merugikan perekonomian negara ini. Walaupun Iran harus mengurangi kapasitas pengayaan uraniumnya selama enam bulan dan Iran harus memberikan keleluasaan bagi IAEA untuk melakukan penyelidikan terhadap program nuklirnya sebagai komitmen Iran mematuhi kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Sending, Ole Jacob, Pouliot, Vincent dan Iver B. Neuman. 2011. *The Future of Diplomacy; Changing Practices, evolving relationships*. International Journal, Summer 2011. Canada: Canadian International Council
- Wehrenfenning, Daniel. 2008. *Multi-track Diplomacy and Human Security*. Human security journal volume 7
- Neumann, IB. *The English school on diplomacy; scholarly promise unfulfilled*. International Relation September 2003
- Memoirs of Hassan Rouhani, 2008. Vol. 1: The Islamic Revolution (in Persian) "Hassan Rouhani leads Iran presidential election vote count". Tehran, Iran: Center for Strategic Research
- Hassan Rouhani, 2008. Memoirs of Hassan Rouhani; Vol. 1: The Islamic Revolution (in Persian). Tehran, Iran: Center for Strategic Research

³³ Scott Burchill, Andrew Linklater. *Theories of International Relations*. Third Editions. 2005, Palgrave Macmillan, pp.29-53

Dina Y. Sulaeman, 2014, *Politik Luar Negeri Iran: Perspektif Global*

Study Diplomacy Edition,
Washington

Anne Hessing Cahn, "Determinants of the Nuclear Option: The Case of Iran," Nuclear Proliferation in the Near Nuclear Countries (Cambridge: Ballinger Publishing Co., 1975), Hlm. 186

Burchill, Scott. 2001. *Realism and Neo-Realism. Theories of International Relations.*

Wibowo, P. Y. 2013. *Indonesia Cerdas. National interest.*

Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih, Juxtapose, 2003, hal 186

Lexy J. Maleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Hans J. Morgenthau dalam TA Coulumbis dan JH Wolfe, Introduction to Internasional Relations (Prentice Hall hal.163,1986), hal 163

Jack Donnelly. 2008. *The Ethics of Realism in Christian Reus-Smit. Duncan Snidal.* Oxford University Press.

Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa, Terjemahan Kenneth W. Thompson, Third Edition. Affred A. Knoff, New York, 1963, hal. 141

Goodin, Robert E. 2010. *The Oxford Handbook of International Relations.* Oxford: Oxford University

Hassan, Hussein D. Iran: Profile of Presiden Mahmoud Ahmadinejad

Mitchell, T. R. 1997. *Research in Organizational Behavior.* Greenwich. CT: JAI Press.

BUKU

Collins, Alan. 2003. *Security and Southeast Asia: domestic, regional and global issues,* Singapore: ISEAS

Satow, Sir Earnest. 1995. *Guide To Diplomatic Praticce.* Dalam bukunya S.L.Roy. *Diplomasi.* Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Basri, Syafiq. 1987. *Iran Pasca Revolusi.* Sebuah Reportase Perjalanan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nur Indriantoro, & Bambang Supomo. 2001. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: BPF

Fauziana, Diah Rahma , Mujib, Izzuddin Irsam. 2009. *Khomeini dan Revolusi Iran.* Yogyakarta: Penerbit Narasi,

Scott Burchill, Andrew Linklater. 2005. *Theories of International Relations. Third Editions.*

Nasir, Tamara. 1980. *Revolusi Iran.* Jakarta: Sinar Harapan

Palgrave Macmillan Sir Harold Nicolson. 1988. *Diplomacy.* Institute for The

Morgenthau, H. J. 1951. *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign*